



ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN REGIONAL DI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

**Khoirul Tamimi¹, Anwar Syarif², Riski Halomoan Siregar³, Rifky Nanda Putra
Lubis⁴, Juliana Nasution⁵**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Ekonomi dan Bisnis Islam

Khoirul09tamimi05@gmail.com, syarifanwar339@gmail.com,

riskihalomoansiregar3@gmail.com, rifkinandalubis@gmail.com,

juliananasution@uinsu.ac.id.

Abstrak

Sustainable economic development in the province of North Sumatra has provided economic and social improvements for the community. On the other hand, several economic constraints that arise between regions, both human resources and capital resources, have created inequality in achievement between districts/cities. This study aims to determine and analyze the effect of investment and balancing funds that enter the region, as well as the labor force and agglomeration in the area to reduce inequality between districts or cities in the province of North Sumatra. This empirical research method uses multiple linear regression analysis with a qualitative approach. The results of this study indicate that economic growth in the Sumatran region has varying levels of diversity, this is because each province has different potential in terms of both natural resources and human resources and the quality of the technology possessed by the province. Differences in the level of development will have an impact on differences in the level of welfare between regions, which in turn will cause regional disparities between regions to increase.

Keywords: Economic Development, Economic Constraints, Level of Development.

Abstrak

Pembangunan ekonomi yang berkesinambungan di provinsi Sumatera Utara telah memberikan peningkatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Disisi lain beberapa kendala ekonomi yang timbul antar daerah baik sumber daya manusia dan sumber daya modal menimbulkan ketimpangan dalam pencapaian antar kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh investasi dan dana perimbangan yang masuk ke daerah, serta angkatan kerja dan aglomerasi di daerah tersebut menurunkan ketimpangan antar kabupaten atau kota di provinsi sumatera utara. Metode Penelitian empiris ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi diwilayah sumatera mempunyai tingkat keragaman yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan setiap provinsi memiliki perbedaan potensi baik dari sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia dan kualitas teknologi yang dimiliki oleh provinsi tersebut. Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak perbedaan, tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional antar wilayah semakin besar.

Kata Kunci: Pembangunan Ekonomi, Kendala Ekonomi, Tingkat Pembangunan.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Indonesia berubah secara dramatis antara tahun 2004 dan 2008. Terdapat 33 provinsi di Indonesia, dan setiap provinsi memiliki potensi yang berbeda-beda baik dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kualitas teknologi, sehingga keragaman pembangunan ekonominya pun berbeda. melalui masyarakat. negara. Pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,03%, meningkat menjadi 6,28% pada tahun 2007, dan pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,06%. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau, salah satunya adalah Sumatera. Sumatera terdiri dari beberapa provinsi seperti Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan dua provinsi pemekaran baru yaitu Pulau Is-Riau dan Kepulauan Perahu Belitung.

Setiap pulau memiliki potensi sumber daya alam dan sektor utama yang menjadi daya tarik negara. Begitu juga dengan keramaian. Perbedaan ini menyebabkan tingkat pertumbuhan pembangunan daerah yang berbeda di setiap provinsi di Indonesia. Ketimpangan wilayah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan penduduk dan pendapatan per kapita dan dianggap sebagai indikator tingkat kemakmuran. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting untuk menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk menganalisis hasil pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Menurut Sukirno (1994), pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi jangka panjang suatu negara. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kegiatan ekonomi yang menyebabkan peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dan peningkatan kekayaan masyarakatnya.

Pembangunan ekonomi daerah adalah peningkatan pendapatan seluruh masyarakat yang terjadi di daerah yang berarti peningkatan nilai tambah bruto. Penghasilan regional awalnya dihitung dengan harga saat ini. Namun untuk melihat peningkatan dari satu periode ke periode berikutnya, harus dinyatakan secara riil. Artinya, itu harus diwakili oleh harga konstan. Pendapatan lokal merupakan upah untuk faktor-faktor produksi (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi) yang digunakan secara lokal dan merupakan ukuran kasar dari kemakmuran

Todaro (1987) menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan dapat terjadi ketika pendapatan dan pengeluaran nasional suatu negara menjadi tidak seimbang sedangkan faktor modal atau investasi berkurang. Ukuran pencapaian pemerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah dalam suatu negara atau provinsi dapat diukur dengan Indeks Williamson. Williamson mengukur hubungan antara perbedaan regional dan tingkat pembangunan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi negara maju dan negara berkembang. Telah diamati bahwa pada tahap awal pembangunan, perbedaan regional tumbuh dan keputusan pembangunan dibuat di wilayah tertentu. (Kuncoro, Mudrajad 2004). Jika nilai indeks Williamson mendekati 1 maka perkembangannya semakin tidak merata, dan sebaliknya jika mendekati 0 maka perkembangan semakin merata.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan berbagai faktor yang terdapat pada masing-masing daerah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan suatu

daerah juga menjadi berbeda. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bilamana pada suatu proses pembangunan suatu wilayah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. Terjadinya ketimpangan antar wilayah membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Indikasi adanya ketimpangan antar kabupaten di suatu provinsi terdapat juga di Sumatera Utara. indikasi ini bisa menyebabkan terhambatnya proses pembangunan secara umum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara di perbatasan antara Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. Ketimpangan dalam pembangunan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

- a) faktor geografis
- b) migrasi
- c) faktor politik
- d) faktor politik
- e) faktor administrasi
- f) faktor sosial
- g) faktor ekonomi

Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan pembangunan yang terjadi di perbatasan antara Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. Seberapa besar ketimpangan di wilayah perbatasan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara? 3) Analisis pola struktur pertumbuhan ekonomi, teknologi dan infrastruktur kawasan dan usulan pengurangan perbedaan pembangunan di kawasan. adalah alat analisis ekonomi wilayah yang digunakan untuk menggambarkan pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk analisis data. Metode penelitian empiris ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan pendekatan kualitatif. Perkembangan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita antar provinsi di Pulau Sumatera dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di Pulau Sumatera. Produk domestik bruto (PDB) suatu wilayah merupakan indikator penting untuk menentukan keadaan perekonomian suatu wilayah selama periode tertentu, biasanya satu tahun. Perkembangan produk domestik bruto atas dasar harga konstan merupakan indikator penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai hasil pembangunan. Pertumbuhan ekonomi provinsi pulau Sumatera didominasi oleh sektor pertanian dan pertambangan. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki unggulan sektor pertambangan, Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi di bidang pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan.

Pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor keuangan dan jasa dunia usaha dan jasa dunia usaha sebesar 11,30 persen. Diikuti oleh sektor jasa sebesar 9,48 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,89 persen, sektor konstruksi sebesar 8,10 persen,

Analisis Ketimpangan Pembangunan Regional Didaerah Provinsi Sumatra Utara

dan sektor pertanian sebesar 6,05 persen. Sedangkan 2 (dua) sektor lainnya hanya mampu tumbuh kurang dari 5 persen. Produk Domestik Bruto Sumatera Utara tahun 2008 atas dasar harga berlaku adalah 213,93 triliun rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan adalah 2.000.106,17 triliun rupiah. Porsi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Sumut sebesar 6,39 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 1,13 persen, sektor jasa 0,91 persen dan sektor pengangkutan dan komunikasi 0,81 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 0,76 persen, sisanya empat industri lainnya.

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi di bidang pertanian, perdagangan dan jasa. Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam dari sektor pertambangan dan memiliki banyak minyak. Provinsi Jambi lebih dominan pada sektor pertanian khususnya pada sektor perkebunan. Provinsi Sumatera Selatan memiliki perekonomian yang relatif tinggi karena potensi migasnya, sedangkan PDRB Lampung didominasi oleh sektor pertanian yang mencakup perkebunan tebu yang cukup luas. Pada prinsipnya pertumbuhan penduduk yang cepat mempengaruhi pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan pendapatan daerah. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk maka semakin rendah pendapatan daerah, dan sebaliknya semakin rendah pertumbuhan penduduk maka semakin tinggi pendapatan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun pemerintah kota harus mempertimbangkan pengelolaan kependudukan untuk meningkatkan.

Analisa Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah di Pulau Sumatera Utara: Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan di kota-provinsi dan wilayah administrasi baru, antara lain perbedaan struktural akibat ketergantungan kegiatan ekonomi yang berlebihan pada sektor tertentu (biasanya sektor primer; pertanian tradisional), sumber daya yang terbatas, dampak pengangguran yang tinggi dan kemiskinan. Minimnya ketersediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan serta buruknya kuantitas dan kualitas infrastruktur yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia karena tidak didukung sumber anggaran yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan. Secara umum pembangunan dapat dicapai dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang cepat mempengaruhi pertumbuhan kekayaan dan ekonomi secara keseluruhan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak serta sering terjadi, tingginya laju pertumbuhan ekonomi tidak otomatis mengurangi ketimpangan yang ada.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Masalah ketimpangan pembangunan daerah tercermin tidak hanya pada ketimpangan ekonomi di Jawa tetapi juga di luar Jawa, termasuk Sumatera. Perbedaan pembangunan provinsi yang besar menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Riau memiliki nilai indeks tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya karena kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Riau. Di provinsi lain seperti Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung, angka indeks umumnya mendekati nol atau relatif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada pemerintah untuk Meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif yaitu dengan memberikan kemudahan perizinan dan penyederhanaan peraturan daerah, memperbaiki kualitas belanja pemerintah untuk

menstimulasi pertumbuhan yaitu dengan mempercepat penyerapan anggaran dan meningkatkan porsi belanja modal untuk memperkuat infrastruktur daerah, meningkatkan nilai tambah industri seperti mendorong berkembangnya klaster industri unggulan daerah, dan juga meningkatkan link and match antara lulusan sekolah atau perguruan tinggi dengan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Havis, A. (2015). Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam. *Islamic Banking*, 4(1), 1–10.
- Dumairy, 1999, *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Erlangga.
- Glasson, John, 1997, *Pengantar Perencanaan Regional*, diterjemahkan Paul Sitohang, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Irawan dan M. Suparmoko. 1987. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta : Liberty.
- Triyanto W, Hg. Suseno, 1991, *Indikator Ekonomi*, Yogyakarta : Kansisus.
- Irwan dan Suparmoko, 1987. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta : Liberty.
- Kuncoro, Mudrajad, 1997, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta : UPPAMPYKPN.
- Todaro, Michael P. 1990, *Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ketiga*, Jakarta :Erlangga.
- Richarson, Harry W, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*,(diterjemahkan Paul Sitohang), Edisi Revisi 2001, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sudibyo, Bambang dkk, 1995, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia* Yogyakarta : Bagian Penerbitan Aditya Media